

RENSTRA



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021

TERWUJUDNYA TENAGA KERJA, INDUSTRI,
DAN TRANSMIGRAN YANG TERBINA,
BERKUALITAS, PRODUKTIF, TERAMPIL,
BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA DALAM
HUBUNGAN KERJA YANG HARMONIS,
DINAMIS DAN BERKEADILAN

DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan kurnia-Nya Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 dapat selesai sesuai dengan yang diharapkan. Keberadaan Renstra ini dapat dijadikan sebagai pedoman atau panduan bagi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai salah satu instansi teknis Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang membidangi urusan Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi. Selain dari itu, Dokumen Renstra ini juga merupakan sebagai bahan dasar pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan rencana strategis ini, oleh karena itu kritikan dan saran yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan penulisan renstra berikutnya. Di samping itu, kami juga menyampaikan permintaan maaf yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak, terutama kepada masyarakat Kapuas Hulu jika dalam renstra ini belum dapat mengakomodir semua pembangunan pada bidang yang menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu.

Putussibau, Agustus 2017

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan
Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu,

Drs. Abdullah Usman, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19580323 198003 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika penyusunan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	8
2.2 Sumber Daya SKPD	23
2.3 Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja	25
2.4 Kinerja Pelayanan SKPD	26
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	27
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	31
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	31
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	33
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	35
3.4 Telaahan Renstra	37
3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	37
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	41
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI	42
4.1 Visi dan Misi	42
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	44
4.3 Strategi dan Kebijakan	46
BAB V MATRIK PAGU INDIKATIF RENSTRA 2016-2021	47
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD	50

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manajemen strategik adalah suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian atas keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan dalam suatu organisasi publik atau organisasi yang berkaitan dengan perlunya penerapan strategi. Manajemen strategik senantiasa diperlukan oleh suatu organisasi publik, dalam hal ini adalah untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan organisasi akan dapat dicapai secara tepat waktu dan tepat sasaran.

Strategik ditinjau dari sudut manajer atau pimpinan organisasi publik dapat diartikan sebagai rencana berskala besar dan berorientasi kepada masa depan dalam berinteraksi dengan lingkungan persaingan guna mencapai sasaran-sasaran organisasi publik itu sendiri. Strategi dapat juga diartikan sebagai kiat/cara yang dirancang secara sistematis dan menyeluruh dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen.

Lingkungan internal organisasi publik adalah merupakan sekumpulan sumber daya, kemampuan dan kompetensi inti. Kondisinya dapat bersifat heterogen tetapi dapat digunakan oleh organisasi publik untuk melakukan aktivitas yang dapat menciptakan nilai lebih, keunggulan bersaing yang berkesinambungan, dan daya saing organisasi dibandingkan dengan organisasi lainnya. Sedangkan lingkungan eksternal organisasi publik adalah berbagai kondisi dalam lingkungan umum yang berbentuk peluang dan juga dapat sekaligus ancaman yang dapat mempengaruhi pilihan strategiknya dan menentukan posisi dalam situasi persaingannya. Peluang (*opportunities*) adalah kondisi-kondisi yang dapat membantu

organisasi publik untuk mencapai daya saing strategis. Sedangkan ancaman (*threath*) adalah kondisi-kondisi dalam lingkungan umum yang dapat mengganggu upaya organisasi publik dalam mencapai tujuan dan daya saing strategis.

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk sebagai hasil perubahan nomenklatur organisasi pemerintahan daerah yang dirubah namanya. Sebelum dilakukannya perubahan, nama SKPD adalah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial yang dibentuk melalui Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 25 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian Tahun 2016 dilakukan perubahan nama SKPD melalui Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu.

Salah satu upaya agar visi dan misi satuan kerja perangkat daerah tercapai, perlu adanya penyusunan rencana strategis program dan kegiatan yang baik. Penyusunan rencana strategis perlu diimbangi dengan perencanaan matang dari organisasi dalam merumuskan strategi untuk kedepannya, agar tujuan organisasi dapat berhasil sesuai target kinerja yang diharapkan. Selain itu juga, proses penyusunan rencana strategis ini harus mengacu juga terhadap visi dan misi Bupati Terpilih, sehingga proses penyusunan rencana strategis SKPD harus melihat apa yang menjadi tujuan pemerintahan Bupati Terpilih dimaksud.

Berdasarkan perubahan nama organisasi yang baru, maka Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi juga merubah perencanaan-perencanaan program dan kegiatan agar adanya sinkronisasi antara

organisasi satu dengan lainnya. Dalam rumusan rencana strategis mencakup perencanaan program lima tahun ke depan yaitu tahun 2016-2021. Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran juga telah disesuaikan dengan perubahan nama organisasi berikut program dan kegiatannya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu ini antara lain adalah :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Negara Nomor 352);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492).
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

- Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Terpencil dan Transmigrasi;
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi;
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kerjsa Sama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 9);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
 19. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan tolak ukur kinerja kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi. Sedangkan tujuan penyusunan rencana strategis ini adalah :

1. Menjadi dasar acuan penyusunan kebijakan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi;
2. Menciptakan keterpaduan dan keserasian gerak dalam kegiatan pembangunan aparatur yang terencana dan memiliki akuntabilitas;
3. Memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi pada Tahun 2016-2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Renstra SKPD Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu ini, agar lebih terarah perlu dirumuskan secara sistematis. Sehingga dalam penulisannya setiap item atau poin yang akan dijabarkan atau digambarkan terstruktur dengan baik. Untuk itu sistematika penulisan Renstra SKPD Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini dijabarkan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematikan penulisan renstra 2016-2021

Bab II Gambaran Pelayanan SKPD. Dalam bab ini tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD, sumber daya SKPD, kinerja SKPD, dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Dalam bab ini dituangkan masalah identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, telaahan renstra K/L dan renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.

Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan. Pada bab ini dituangkan masalah visi dan misi SKPD, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD serta strategi dan kebijakan SKPD.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Bab VI Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut:

a. Kedudukan

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di Bidang Tenaga Kerja, Bidang Perindustrian dan Bidang Transmigrasi

2.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi;

2. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi;
4. Pelaksanaan administrasi dinas;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

a. Kepala Dinas

Untuk Melaksanakan tugas, Kepala Dinas melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- Penetapan rencana operasional Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi;
- Pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi dengan instansi lainnya;
- Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi;
- Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan rencana operasional dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan di bidang Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi;
- Pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi secara periodik;

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sekretaris

Untuk Melaksanakan tugas, Sekretaris melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan program kerja Sekretariat;
- Pengkoordinasian penyusunan program kerja Dinas;
- Pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
- Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tatalaksana Dinas;
- Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan pengelolaan barang milik Dinas;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Dinas;
- Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Sub Bagian Program

Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Program melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan rencana kerja subbagian program;
- Penyiapan bahan penyusunan rencana strategis dan program kerja Dinas;

- Penyusunan rencana kerja dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran dinas;
- Penyusunan penetapan kinerja, perjanjian kinerja dan laporan kinerja Dinas;
- Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap bidang dan UPT;
- Pengendalian dan pelaporan program kerja dinas;
- Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Keuangan

Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Keuangan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
- Penyelenggaraan tata usaha keuangan dinas;
- Penyusunan neraca, laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan dinas;
- Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan dinas;
- Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas subbagian keuangan; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Sub Bagian Umum dan Aparatur

Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Personil dan Umum melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
- Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur dinas;
- Penyelenggaraan ketatalaksanaan dinas;
- Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga kearsipan dan perpustakaan dinas;
- Pengelolaan barang milik dinas;
- Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Tenaga Kerja

Untuk Melaksanakan tugas, Bidang Tenaga Kerja melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan rencana operasional Bidang Tenaga Kerja;
- Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Tenaga Kerja;
- Pelayanan pelatihan kerja dan produktivitas kerja;
- Pelayanan penempatan tenaga kerja;
- Perlindungan tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial;

- Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Tenaga Kerja;
- Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Tenaga Kerja secara periodik;
- Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Tenaga Kerja secara periodik; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1) Seksi Pelatihan, Produktivitas, dan Penempatan Tenaga Kerja

Untuk Melaksanakan tugas, Seksi Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelatihan, Produktivitas, dan Penempatan Tenaga Kerja;
- Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Kerja;
- Pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan unit kompetensi;
- Pelayanan perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja serta pembinaan lembaga pelatihan kerja;
- Fasilitasi konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil dan pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten;
- Pelayanan antar kerja;

- Penerbita izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1(satu) Daerah Kabupaten;
- Pengelolaan informasi pasar kerja dalam daerah kabupaten;
- Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah kabupaten;
- Penerbitan perpanjangan izin menggunakan Tenaga Kerja Asing yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
- Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pelatihan, Produktivitas, dan Penempatan Tenaga Kerja; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Perlindungan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial Untuk Melaksanakan tugas, Seksi Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan rencana kegiatan Seksi Perlindungan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial;
- Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Seksi Perlindungan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial;
- Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;

- Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah kabupaten;
- Penyusunan bahan penetapan upah minimum kabupaten dan sektoral;
- Pengembangan sistem pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
- Penyiapan bahan dalam rangka membentuk kelembagaan di perusahaan melalui perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP), perjanjian kerja bersama (PKB), dan lembaga kerjasama bipartit;
- Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi-Seksi Perlindungan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Perindustrian

Untuk Melaksanakan tugas, Bidang Perindustrian melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan rencana operasional Bidang Perindustrian;
- Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Perindustrian;
- Penetapan rencana pembangunan industry Daerah Kabupaten;
- Pembinaan dan pengembangan industri pangan;

- Pembinaan dan pengembangan industri sandang, logam, aneka dan kerajinan;
- Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Perindustrian;
- Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Perindustrian secara periodik;
- Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Perindustrian secara periodik; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1) Seksi Industri Pangan

Untuk Melaksanakan tugas, Seksi Industri Pangan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan rencana kegiatan Seksi Industri Pangan;
- Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengembangan Industri Pangan;
- Fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri;
- Pengembangan kemitraan dan pendampingan industri pangan;
- Fasilitasi pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi serta kreatifitas industri pangan;
- Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standarisasi industri pangan;
- Fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan dan sentra industri pangan;

- Fasilitasi pemberian informasi, promosi, dan pemasaran industri pangan;
- Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Industri Pangan; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Industri Sandang, Logam, Aneka dan Kerajinan

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Industri Sandang, Logam, Aneka dan Kerajinan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan rencana kegiatan Seksi Industri Sandang, Logam, Aneka dan Kerajinan;
- Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengembangan Industri Sandang, Logam, Aneka dan kerajinan;
- Fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri sandang, logam, aneka dan kerajinan;
- Pengembangan kemitraan dan pendampingan industri sandang, logam, aneka dan kerajinan;
- Fasilitasi pemanfaatan sumber daya alam, teknologi, kreatifitas dan inovasi industri sandang, logam, aneka dan kerajinan;
- Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standarisasi industri sandang, logam, aneka dan kerajinan;

- Fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan dan sentra industri sandang, logam, aneka dan kerajinan;
- Fasilitasi pemberian informasi, promosi, dan pemasaran industri sandang, logam, aneka dan kerajinan;
- Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Industri Sandang, Logam, Aneka, dan Kerajinan; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Transmigrasi

Untuk Melaksanakan tugas, Bidang Transmigrasi melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan rencana operasional Bidang Transmigrasi;
- Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Transmigrasi;
- Penyusunan rencana kawasan transmigrasi;
- Pelaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi;
- Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
- Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Transmigrasi;
- Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Transmigrasi secara periodik;
- Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Transmigrasi secara periodik; dan

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1) Seksi Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Untuk Melaksanakan tugas, Seksi Penataan Kawasan Transmigrasi melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan rencana kegiatan Seksi Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
- Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pembangunan kawasan transmigrasi;
- Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di daerah kabupaten;
- Pengusulan Rencana Kawasan Transmigrasi;
- Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah kabupaten;
- Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pembangunan Kawasan transmigrasi; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Transmigrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Untuk Melaksanakan tugas, Seksi Pembinaan dan Penempatan Transmigrasi melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengembangan transmigrasi;
- Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
- Pelaksanaan bimbingan, fasilitasi, bantuan, pelayanan, pendampingan, mediasi, advokasi, dan/atau pelatihan pada satuan permukiman transmigrasi tahap kemandirian;
- Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Transmigrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

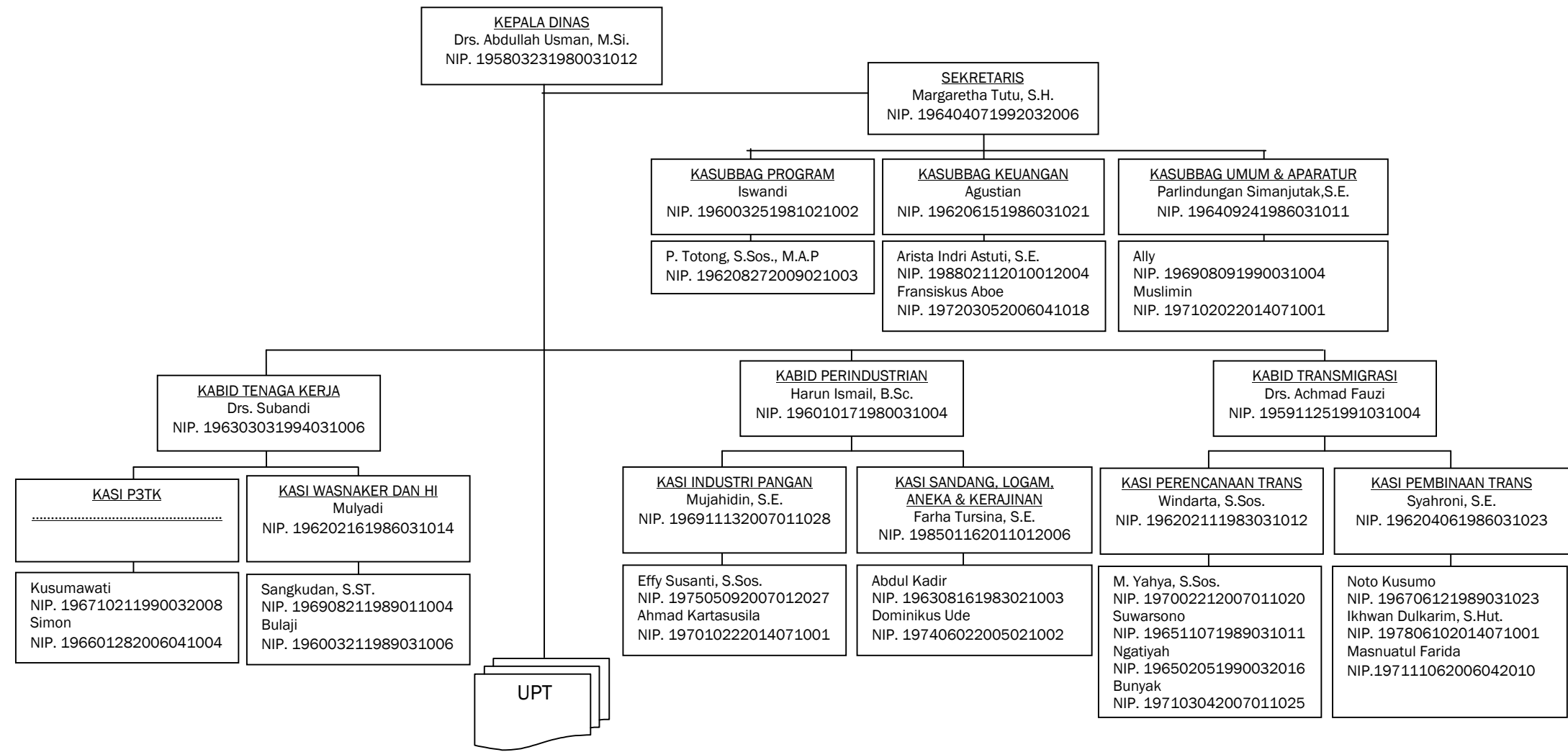
2.1.3 Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2016, struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
 - a) Kasubbag Program
 - b) Kasubbag Keuangan
 - c) Kasubbag Umum dan Aparatur
3. Bidang Tenaga Kerja;
 - a) Kasi Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja

- b) Kasi Perlindungan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial
- 4. Bidang Perindustrian
 - a) Kasi Industri Pangan
 - b) Kasi Industri Sandang, Logam, Aneka dan Kerajinan
- 5. Bidang Transmigrasi;
 - a) Kasi Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi
 - b) Kasi Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
- 6. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS HULU



2.2 Sumber Daya SKPD

2.2.1 Susunan Kepegawaian

Untuk mendukung struktur jabatan tersebut di atas, maka pada Dinas Tenaga kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu ditempatkan pegawai-pegawai yang biasa mengakomodir setiap pekerjaan yang ada pada bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial, serta pekerjaan administrasi umum lainnya. Pegawai-pegawai pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu yang ada dapat dilihat dari segi status, tingkat pendidikan, pangkat dan golongan.

2.2.2 Pegawai berdasarkan status yang ada.

Pegawai Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu jika dilihat dari status kepegawaian yang ada dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Keadaan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri	37
2.	Pegawai Honorer	11
TOTAL		48

Sumber : Dinas Nakerintran Tahun 2016

2.2.3 Pegawai berdasarkan pangkat dan golongan

Pegawai yang ada pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu khususnya PNS pada saat sekarang ini jika ditinjau berdasarkan pangkat/golongan yang ada dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Keadaan Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat/Golongan Pegawai	Jumlah
1.	Golongan IV	5
2.	Golongan III	23
3.	Golongan II	9
4.	Golongan I	0
TOTAL		37

Sumber : Dinas Nakerintrans Tahun 2016

2.2.4 Tingkat Pendidikan Pegawai

Tingkat Pendidikan pegawai Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu yang ada sekarang sudah memadai dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD, namun keberadaan tingkat pendidikan tersebut jika ditinjau lebih seksama lagi masih kurang dari kebutuhan yang ada. Tingkat pendidikan pegawai yang ada sekarang dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Keadaan Tingkat Pendidikan Pegawai

No	Tingkat Pendidikan Pegawai	Jumlah
1.	SARJANA S-2	2
2.	SARJANA S-1	16
3.	DIPLOMA/SARMUD	1
4.	SMA	18
5.	SMP	0
TOTAL		37

Sumber: Dinas Nakerintrans Tahun 2016

2.3 Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja

Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, maka pegawai-pegawai yang ada pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu di bekali dengan perlengkapan atau alat kerja. Alat kerja yang dimaksud di sini berupa barang-barang inventaris kantor yang digunakan sebagai pendukung utama pelaksanaan pekerjaan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Adapun perlengkapan-perengkapan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4
 Keadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja

No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan
1.	Kendaraan Roda 4	2	Unit
2.	Kendaraan Roda 2	30	Unit
3.	Komputer PC	29	Unit
4.	Laptop/Notebook	15	Unit
5.	Printer	15	Unit
6.	Faximile	1	Buah
7.	Telepon	1	Buah
8.	Jaringan Internet	-	-

Sumber : Dinas Nakerintrans Tahun 2016

Barang-barang yang tertera pada tabel di atas pada saat sekarang merupakan perlengkapan kerja yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu dalam menjalankan atau melaksanakan Tugas pokok dan fungsi yang telah menjadi tanggung jawab dan wewenang dari Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu.

2.4 Kinerja Pelayanan SKPD

1. Bidang Tenaga Kerja

Adapun kinerja pelayanan pada bidang tenaga kerja meliputi :

- a) Pelayanan Pembuatan kartu AK-1 Ketenagakerjaan
- b) Pelayanan mediasi hubungan industrial

2. Bidang Perindustrian

Adapun kinerja pelayanan pada bidang perindustrian meliputi :

- a) Bantuan mesin, peralatan dan perlengkapan pada pelaku IKM
- b) Fasilitasi pengujian produk pangan
- c) Melaksanakan bimtek/pelatihan pada pelaku IKM
- d) Melaksanakan bimtek/diklat bagi aparatur pembina industri
- e) Fasilitasi packing/kemasan pada pelaku IKM
- f) Partisipasi promosi produk unggulan daerah
- g) Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pada pelaku IKM
- h) Melakukan pemberdayaan masyarakat sektor perdesaan
- i) Melaksanakan koordinasi baik ditingkat daerah, provinsi maupun pusat

3. Bidang Transmigrasi

Adapun kinerja pelayanan pada bidang transmigrasi meliputi :

- a) Pelayanan Pembinaan warga transmigrasi
- b) Pelayanan peningkatan kesejahteraan warga transmigrasi

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

2.5.1 Bidang Sekretariat

a. Tantangan Pelayanan

- 1) Sering terlambatnya input data dari unit lain
- 2) Sering terlambatnya proses perencanaan di tingkat kabupaten
- 3) Adanya anggapan bahwa penyusunan rencana program hanya tugas bagian tata usaha/sub bagian proram.

b. Peluang Pelayanan

- 1) Adanya keinginan dari staf bidang dan bagian untuk mengikuti bimtek
- 2) Adanya Keputusan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang SOTK Dinas
- 3) Adanya perubahan perencanaan pembangunan daerah sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2.5.2 Bidang Tenaga Kerja

a. Tantangan Pelayanan

Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu melalui bidang tenaga kerja tentunya tidak terlepas dari tantangan atau masalah-masalah di lapangan, sehingga tidak jarang tantangan tersebut menjadi sebuah kendala-kendala yang tentunya mempengaruhi proses pelayanan tersebut. Adapun kendala-kendala yang rentan dihadapi oleh bidang tenaga kerja dalam proses pelayanan kepada masyarakat antara lain:

- 1) Belum semua perusahaan mengasuransikan tenaga kerjanya
- 2) Relatif rendahnya tingkat pendidikan kerja
- 3) Belum terbentuknya serikat pekerja/buruh

b. Peluang Pelayanan

Disamping kendala-kendala yang rentan terjadi di lapangan, namun peluang juga terbuka untuk menciptakan proses pelayanan yang prima kepada masyarakat, antara lain:

- 1) Angkatan kerja yang belum terlatih dan terampil masih cukup banyak
- 2) Kemauan tenaga kerja untuk mengikuti pelatihan cukup tinggi
- 3) Peluang kerja masih terbuka cukup besar
- 4) Mengaktifkan lagi bursa online tenaga kerja.

2.5.3 Bidang Perindustrian

a. Tantangan Pelayanan

Dalam proses memberikan pelayanan kepada masyarakat, bidang perindustrian tidak terlepas dari tantangan di lapangan, antara lain :

- 1) Masih minimnya dana untuk melakukan pembinaan.
- 2) Belum maksimalnya ASN yang ditempatkan pada bidang perindustrian baik, kualitas maupun kuantitas.
- 3) Belum optimalnya pengenalan teknologi tepat guna dalam pengolahan sumber dayaan alam dan pengolahan hasil.
- 4) Belum tersedianya sarana untuk melakukan dalam pengolahan hasil.

- 5) Belum tersedianya produk-produk hasil sumber daya alam yang menjadi unggulan.
- 6) Masih minimnya data produksi sumber daya alam sebagai bahan baku pengolahan hasil.
- 7) Belum optimalnya sarana promosi menggunakan sistem online.
- 8) Kurangnya SDM yang menguasai informasi teknologi.
- 9) Sinkronisasi program/kegiatan antara SKPD yang menyediakan industri hulu (bahan baku) belum maksimal.
- 10) Masih adanya tumpang tindih pekerjaan antar SKPD.

b. Peluang Pelayanan

- 1) Tersedianya sumber daya alam yang akan dimanfaatkan
- 2) Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan
- 3) Program pemerintah pusat melalui nawacita yang akan membangun pinggiran/perbatasan
- 4) Telah tersedianya regulasi aturan yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 dan telah ditetapkannya Rencana Induk Pembangunan dibidang perindustrian.
- 5) Adanya komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sumber daya daerah yang berkelanjutan sebagaimana yang telah dituangkan dalam visi dan misi bupati tahun 2016-2021.

2.5.4 Bidang Transmigrasi

a. Tantangan Pelayanan

Adapun tantangan yang sering dihadapi oleh bidang transmigrasi dalam proses memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama untuk masyarakat warga transmigrasi, antara lain:

- 1) Terjadi bencana alam musiman seperti banjir di lokasi transmigrasi.
- 2) Proses penyaluran jadup yang terkadang terlambat
- 3) Masalah dalam penerbitan sertifikat tanah warga transmigrasi
- 4) Kurangnya sarana dan prasarana fasilitas umum di lokasi transmigrasi.

b. Peluang Pelayanan

- a) Masih tersedia lahan untuk pengembangan wilayah transmigrasi, hanya perlu sosialisasi kepada masyarakat daerah tujuan.
- b) Akses menuju wilayah transmigrasi sudah ada terutama jalur darat.
- c) Cukupnya petugas KUPT untuk setiap UPT binaan.
- d) Tersedianya untuk pembinaan masyarakat transmigrasi.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

SKPD

3.1.1 Bidang Sekretariat

Adapun permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi di bidang sekretariat pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi adalah:

- a) Terjadinya kesalahan-kesalahan dalam proses perencanaan pendanaan program dan kegiatan.
- b) Sistem pelaporan terkadang terlambat karena terlambatnya siklus kerja dari bidang-bidang.
- c) Penggunaan waktu kerja belum efektif dan efisien oleh setiap pegawai.
- d) Kurangnya pendanaan untuk jenis-jenis kegiatan yang tidak terduga selama siklus program dan kegiatan SKPD.

3.1.2 Bidang Tenaga Kerja

Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu melalui bidang tenaga kerja tentunya tidak terlepas dari permasalahan di lapangan, sehingga tidak jarang permasalahan tersebut menjadi sebuah kendala-kendala yang tentunya mempengaruhi proses pelayanan tersebut. Adapun masalah-masalah yang rentan dihadapi oleh bidang tenaga kerja dalam proses pelayanan kepada masyarakat antara lain:

- a) Masalah konflik buruh dengan pihak perusahaan.
- b) Kurangnya partisipasi pihak perusahaan untuk memberikan laporan data tenaga kerja di perusahaan terutama tenaga kerja asing.
- c) Masih terbatasnya dana untuk kegiatan pelatihan tenaga kerja produktif untuk meningkatkan SDM tenaga kerja siap pakai.
- d) Kurangnya lapangan pekerjaan untuk menampung jumlah pencari kerja di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

3.1.3 Bidang Perindustrian

Dalam proses memberikan pelayanan kepada masyarakat, bidang perindustrian tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan di lapangan, antara lain :

- a) Masih kurangnya dana untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku IKM.
- b) Adanya keluhan masyarakat terhadap pemasaran produk hasil kerajinan tangan.
- c) Kurangnya tenaga penyuluh perindustrian untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku IKM.

3.1.4 Bidang Transmigrasi

Adapun permasalahan yang sering dihadapi oleh bidang transmigrasi dalam proses memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama untuk masyarakat warga transmigrasi, antara lain:

- a) Terjadi bencana alam musiman seperti banjir di lokasi transmigrasi.

- b) Proses penyaluran jadup yang terkadang terlambat
- c) Terlambat penerbitan sertifikat tanah warga transmigrasi
- d) Kurangnya sarana dan prasarana fasilitas umum di lokasi transmigrasi.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Rumusan Visi dan Misi

Berdasarkan kondisi saat ini dan isu-isu strategis pada 5 tahun mendatang, serta penggalian aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah dilakukan, maka visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2016-2021 adalah:

“Menuju Kapuas Hulu Yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing dan Harmonis”

Sesuai dengan visi di atas maka dirumuskan misi dalam Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu untuk 2016-2021, sebagai berikut:

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bersih.
2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sumber daya daerah yang berkelanjutan.
3. Meningkatkan layanan infrastruktur dasar dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

3.2.2 Telaahan Visi dan Misi

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No.	Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bersih	- Perubahan pelayanan jamsostek ketenagakerjaan - Layanan system keuangan akrual - Penempatan pegawai belum sesuai tupoksi	- Belum semua perusahaan terdata sebagai peserta jamsostek - Belum adanya jaringan internal SKPD - Kekurangan pegawai	- Adanya proses sosialisasi - Dilakukan dengan cara penggunaan modern atau manual system - Perlu penambahan pegawai
2.	Memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sumber daya daerah yang berkelanjutan	- Pelatihan tenaga kerja produktif, terampil dan mandiri - Belum adanya pusat pelatihan tenaga kerja - Pemasaran produk industri belum maksimal - Minimnya Dana Pembinaan - Belum maksimalnya ASN di Bidang Perindustrian - Belum optimalnya pengenalan teknologi tepat guna dalam pengolahan sumber daya alam - Belum tersedianya produk-produk hasil sumber daya	- Terbatasnya dana - Terbatasnya dana - Terbatasnya tempat pemasaran - Terbatasnya dana - Rendahnya kualitas ASN - Pengolahan masih dilakukan secara tradisional - Terbatasnya bahan baku komoditi	- Angkatan kerja banyak - Tersedianya lahan - SDA tersedia - Tersedianya dana - Penempatan ASN yang paham tentang industri - Penyediaan teknologi tepat guna - Tersedianya bahan baku komoditi

		alam yang menjadi unggulan. - Belum tersedianya sarana pengolahan hasil - Sinkronisasi program/kegiatan antar SKPD	unggulan - Sarana pengolahan tidak maksimal - Tidak sinkronnya program/kegiatan antar SKPD	unggulan - Tersedianya sarana pengolahan hasil yang maksimal - Adanya singronisasi program/kegiatan antar SKPD
3.	Meningkatkan layanan infrastruktur dasar dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	- Infrastruktur lokasi transmigrasi belum bagus - Fasilitas umum di lokasi transmigrasi belum lengkap	- Terbatasnya dana pembangunan - Pendanaan	- Pemasaran produk pertanian warga - Lahan transmigrasi

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.3.1 Bidang Sekretariat

- 1) Kekuatan
- Adanya tugas pokok dan fungsi pegawai
 - Tersedianya sarana dan prasarana
 - Adanya komitmen dari pemimpin
- 2) Kelemahan
- Rendahnya kemampuan aparatur dalam penyusunan rencana program
 - Belum tersedianya data base
 - Terbatasnya personil sub bagian program

3.3.2 Bidang Tenaga Kerja

- 1) Kekuatan
- tersedianya program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja
 - Adanya tenaga pengawasan ketenagakerjaan

- Adanya tenaga mediator untuk hubungan industrial
- Adanya proses sosialisasi peraturan ketenagakerjaan

2) Kelemahan

- Lapangan pekerjaan terbatas untuk menampung jumlah pencari kerja
- Belum tersedianya instruktur yang professional
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas
- Belum semua perusahaan menerapkan peraturan-peraturan ketenagakerjaan

3.3.3 Bidang Perindustrian

1) Kekuatan

- Adanya kegiatan pembinaan terhadap pelaku IKM
- Tersedianya sumber daya alam berupa produk hasil industry
- Tersedianya sumber daya manusia yang mampu menghasilkan produk industri

2) Kelemahan

- Terbatasnya dana pembinaan terhadap pelaku IKM
- Sarana dan prasarana industry kerajinan tangan masih sederhana.
- Produk hasil industry berupa kerajinan tangan masih sulit dalam pemasaran produk.

3.3.4 Bidang Transmigrasi

1) Kekuatan

- Terlaksananya sistem pembinaan untuk masyarakat transmigrasi selama 5 tahun

- Lahan untuk wilayah permukiman transmigrasi masih luas
- Adanya kerjasama antara daerah pengirim dan penerima program transmigrasi

2) Kelemahan

- Kurang dana pembinaan untuk warga transmigrasi
- Masih belum semua masyarakat menerima program transmigrasi
- Sering terjadinya warga transmigrasi yang meninggalkan permukiman transmigrasi tanpa pemberitahuan kepala UPT.

3.4 Telaahan Renstra

- a) Perencanaan program dan kegiatan setiap bidang sudah memuat untuk lima tahun ke depan
- b) Perencanaan pagu dana indikatif untuk program dan kegiatan lima tahun sudah terinci
- c) Program dan kegiatan pembinaan di bidang tenaga kerja, perindustriandan transmigrasi sudah terinci dengan baik untuk lima tahun ke depan.

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5.1 Rencana Tata Ruang Wilayah

Adapun perencanaan tata ruang wilayah pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu 5 tahun mendatang untuk mendukung proses perencanaaan program dan kegiatan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- a) Adanya rencana permukiman transmigrasi baru (PTB) di Kecamatan Mentebah, Kecamatan Bunut Hilir dan Kecamatan Bika.
- b) Adanya rencana lokasi survei indentifikasi calon area (SICA) untuk lokasi transmigrasi di Desa Benuis, Gerayau, dan Sekubah Kecamatan Selimbau.
- c) Adanya rencana tata ruang satuan permukiman/rencana tata ruang unit permukiman transmigrasi (RTSP/RT-UPT) di Desa Benuis, Gerayau, Sekubah Kecamatan Selimbau.
- d) Adanya rencana permukiman transmigrasi baru di daerah perbatasan di Kecamatan Badau dan Kecamatan Puring Kencana.
- e) Adanya rencana pembangunan lima sentra industry baru di Kabupaten Kapuas Hulu.

3.5.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Untuk kajian lingkungan hidup strategis di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu hanya pada tingkat dokumen pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan pemantauan lingkungan hidup (UPL). Adapun UKL dan UPL yang dilakukan yaitu pembangunan pemukiman transmigrasi UPT Desa Kirin Nangka SP1 Kecamatan Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas Hulu yang meliputi:

- a. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
 - 1) Nama rencana usaha
 - 2) Lokasi kegiatan
 - 3) Skala usaha dan atau kegiatan
 - Luas lahan rencana usaha dan/atau kegiatan

- Jenis dan kapasitas daya tampung
 - Ketersediaan fasilitas pendukung pemukiman
 - Penggunaan sumber material bangunan
 - Penggunaan tenaga kerja
- b. Garis besar komponen rencana usaha dan/ atau kegiatan
- Tahap pra-konstruksi
 - Tahap konstruksi
 - Tahap pasca konstruksi (operasi)
- c. Rona Lingkungan Hidup
- 1) Lingkungan fisik-kimia
- Iklim setempat
 - Hidrologi
 - Topografi
 - Ruang, lahan, tanah
- 2) Lingkungan biologi
- Keanekaragaman flora/vegetasi
 - Keanekaragaman fauna/satwa liar
 - Hama dan penyakit tanaman
- 3) Lingkungan Sosial Ekonomi dan Budaya
- Kependudukan (demografi)
- 4) Lingkungan Kesehatan Masyarakat
- Kesehatan Lingkungan
 - Pola penyakit
 - Pelayanan kesehatan

d. Dampak Lingkungan Hidup Yang Akan Terjadi

- 1) Komponen usaha dan/atau kegiatan yang menjadi sumber dampak terhadap lingkungan hidup
 - Tahap pra-konstruksi
 - Tahap konstruksi
 - Tahap pasca konstruksi (operasi)
- 2) Jenis dampak lingkungan hidup yang terjadi
 - Identifikasi dampak lingkungan
 - Komponen lingkungan yang terkena dampak
- 3) Dampak lingkungan yang akan terjadi
 - Tahap pra-konstruksi
 - Tahap konstruksi
 - Tahap pasca-konstruksi

e. Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

- 1) Program pengelolaan lingkungan hidup (UKL) pembangunan pemukiman transmigrasi Desa Kirin Nangka SP1 Kecamatan Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas Hulu
- 2) Program pemantauan lingkungan hidup (UPL) pembangunan pemukiman transmigrasi Desa Kirin Nangka SP1 Kecamatan Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas Hulu

3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis

Segala ancaman, tantangan dan kelemahan yang diuraikan di atas bila tidak dapat diselesaikan dengan baik akan menjadi masalah-masalah ke depan yang akan dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu sehingga akan mempengaruhi kinerja SKPD secara umum dan akan menjadi faktor penghambat dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

BAB. IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

4.1.1 Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang menjadi inspirasi, inovasi dan sumber kreativitas yang mengarahkan proses penyelenggaraan administrasi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran perubahan yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi menetapkan Rencana Strategis pada Tahun 2016-2021 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja,

Perindustrian dan Transmigrasi dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi 2016-2021 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya yang terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya. Dalam proses peningkatan kinerja secara optimal di masa yang akan datang adalah dengan mengimplementasikan sebuah Visi sebagai berikut:

“ Terwujudnya tenaga kerja, industri dan transmigran yang terbina, berkualitas, produktif, terampil, berdaya saing dan sejahtera dalam hubungan kerja yang harmonis, dinamis dan berkeadilan”.

4.1.2 Misi

Misi merupakan suatu rumusan umum dari visi untuk menetapkan langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Dengan dirumuskan sebuah misi tersebut, maka diharapkan dapat menciptakan aparatur yang profesional, handal dan dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara terampil, baik dan benar, dapat mewujudkan cita-cita penyelenggaraan pemerintahan yaitu *Good Governance* yaitu profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas KKN. Untuk merealisasikan visi dari pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu di masa yang akan datang, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem informasi dan perencanaan tenaga kerja daerah

2. Mengembangkan investasi industri, niaga dan kemantapan kelembagaan dan kesejahteraan UMKM.
3. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas transmigrasi dan kawasan transmigrasi.
4. Peningkatan pengelolaan teknis pelayanan administrasi perkantoran.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.2.1 Tujuan

Dalam rangka mendukung proses Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan penerapan daripada visi serta misi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi, maka tujuan yang diharapkan untuk ke depannya adalah sebagai berikut;

1. Pengembangan sistem informasi dan perencanaan tenaga kerja daerah.
2. Pengembangan investasi industri, niaga dan kemantapan kelembagaan dan kesejahteraan UMKM.
3. Peningkatan dan pengembangan kualitas transmigrasi dan kawasan transmigrasi.
4. Meningkatkan pengelolaan teknis pelayanan administrasi perkantoran

4.2.2 Sasaran

Sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu merupakan penjabaran dari misi dan tujuan strategis yang telah ditetapkan, menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan setia tahun melalui serangkaian

strategi. Penetapan sasaran strategis ini perlu untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijakan, program dan kegiatan sesuai sumber daya yang dimiliki serta dialokasikan setiap tahun anggaran berdasarkan periode rencana strategis.

Sasaran strategis ini merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja/instansi yang berhubungan dengan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga akan tercapai. Adapun sasaran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja.
2. Meningkatnya produksi sektor industri.
3. Meningkatnya pembinaan, penyuluhan dan pengembangan kawasan transmigrasi.
4. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur dan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan.

4.3 Strategi dan Kebijakan

4.3.1 Strategi

1. Mendorong pengembangan sistem informasi dan perencanaan tenaga kerja daerah
2. Mendorong peningkatan produksi sektor industri
3. Mendorong peningkatan pembinaan, penyuluhan dan pengembangan kawasan transmigrasi
4. mendorong peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur dan sistem pelaporan capaian kinerja serta keuangan.

4.3.2 Kebijakan

Berdasarkan kebijakan pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu, dan dalam usaha untuk mencapai tujuan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi. Maka dirumuskan kebijakan sebagai berikut:

a. Bidang Tenaga Kerja

1. Penyiapan tenaga kerja mandiri serta peningkatan keterampilan tenaga kerja dan pengembangan kemampuan kewirausahaan
2. Meningkatkan perlindungan dan keselamatan tenaga kerja

b. Bidang Perindustrian

1. Mengembangkan industri kecil dan menengah dengan pembentukan sentra-sentra industri pengolahan hasil pertanian, perikanan dan perkebunan.

c. Bidang Transmigrasi

1. Meningkatkan kerjasama antar daerah asal transmigrasi dan penyiapan sarana prasarana pendukung.

BAB. VI
INDIKATOR KINERJA SKPD
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS HULU

TUGAS DAN FUNGSI :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
- d. Pelaksanaan administrasi dinas
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

No.	Tujuan	Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pengembangan Sistem Informasi dan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	Meningkatnya kualitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja	1.	Angka partisipasi angkatan kerja	Bidang Tenaga Kerja	
			2.	Tingkat partisipasi angkatan kerja		
			3.	Pencari kerja yang ditempatkan		
			4.	Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja		
			5.	Jumlah pelatihan kerja		
			6.	Jumlah sertifikasi kerja		
2.	Pengembangan Investasi Industri, Niaga dan Kemantapan Kelembagaan dan Kesejahteraan UMKM	Meningkatnya produksi sektor industri	1.	Perkembangan IKM:	Bidang Perindustrian	
			a.	Jumlah unit		
			b.	Tenaga Kerja		
			c.	Nilai investasi		
			2.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB		
			3.	Cakupan bina kelompok pengrajin		
3.	Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi	Tersedianya calon transmigrasi yang siap diberangkatkan ke tempat tujuan	1.	Persentase kerjasama antar daerah kawasan transmigrasi	Bidang Transmigrasi	
			2.	Transmigrasi swakarsa		

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
RENCANA STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
Tahun 2016 - 2021

VISI : TERWUJUDNYA TENAGA KERJA, INDUSTRI, DAN TRANSMIGRAN YANG TERBINA, BERKUALITAS, PRODUKTIF, TERAMPIL, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA DALAM HUBUNGAN KERJA YANG HARMONIS, DINAMIS DAN BERKEADILAN

MISI 1 : Mengembangkan Sistem Informasi dan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah

Tujuan			Sasaran				Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran						Sek/Bidang/Bagian Pelaksana			
Uraian		Indikator Kinerja		Uraian		Indikator Kinerja		Kebijakan			Program					
1.1	Meningkatnya perekonomian daerah dengan mengoptimalkan potensi daerah dan perluasan kesempatan berusaha	1	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	1.1.1	Meningkatnya kualitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja	1	Angka partisipasi angkatan kerja	1.1.1.1	Penyiapan tenaga kerja mandiri serta peningkatan keterampilan tenaga kerja dan pengembangan kemampuan kewirausahaan			1	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Kerja (PKPTK)		1	Bidang Tenaga Kerja
		2	PDRB per Kapita			2	Tingkat parisipasi angkatan kerja	1.1.1.2	Meningkatkan perlindungan dan keselamatan tenaga kerja			2	Peningkatan Kesempatan Kerja			
		3	Laju Inflasi			3	Pencari kerja yang ditempatkan					3	Perlindungan Pengembangan			
		4	Tingkat Kemiskinan			4	Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja									
						5	Jumlah pelatihan kerja									
						6	Jumlah sertifikasi pekerja									

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
RENCANA STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
Tahun 2016 - 2021

V I S I : TERWUJUDNYA TENAGA KERJA, INDUSTRI, DAN TRANSMIGRAN YANG TERBINA, BERKUALITAS, PRODUKTIF, TERAMPIL, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA DALAM HUBUNGAN KERJA YANG HARMONIS, DINAMIS DAN BERKEADILAN

M I S I 3 : Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi

Tujuan				Sasaran				Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran						Sek/Bidang/Bagian Pelaksana	
Uraian		Indikator Kinerja		Uraian		Indikator Kinerja		Kebijakan		Program					
3.1	Meningkatnya perekonomian daerah dengan mengoptimalkan potensi daerah dan perluasan kesempatan berusaha	1	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	3.1.1	Tersedianya calon transmigran swakarsa/lokal yang siap	1.	Persentase Kerjasama antar daerah kawasan transmigrasi	3.1.1.1	Meningkatkan kerjasama antar daerah asal transmigrasi dan penyiapan sarana prasarana pendukung	1	Pengembangan Wilayah Transmigrasi	1	Bidang Transmigrasi		
		2	PDRB per Kapita			2.	Transmigrasi swakarsa			2	Transmigrasi Lokal				
		3	Laju Inflasi												
		4	Tingkat Kemiskinan												

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
RENCANA STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
Tahun 2016 - 2021

V I S I : TERWUJUDNYA TENAGA KERJA, INDUSTRI, DAN TRANSMIGRAN YANG TERBINA, BERKUALITAS, PRODUKTIF, TERAMPIL, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA DALAM HUBUNGAN KERJA YANG HARMONIS, DINAMIS DAN BERKEADILAN

M I S I 2 : Peningkatan Investasi Industri, Niaga dan Kemantapan Kelembagaan dan Kesejahteraan UMKM

Tujuan				Sasaran				Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran				Sek/Bidang/Bagian Pelaksana	
Uraian		Indikator Kinerja		Uraian		Indikator Kinerja		Kebijakan		Program			
2.1	Meningkatnya perekonomian daerah dengan mengoptimalkan potensi daerah dan perluasan kesempatan berusaha	1	Persentase pertumbuhan ekonomi	2.1.1	Meningkatnya Produksi Sektor Industri	1	Perkembangan IKM	2.1.1.1	Mengembangkan industri kecil dan menengah dengan pembentukan sentra-sentra industri pengolahan hasil pertanian, perikanan dan perkebunan	1.	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	1	Bidang Perindustrian
		2	PDRB per kapita			a.	Jumlah Unit			2.	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah		
		3	Laju inflasi			b.	tenaga kerja						
		4	Tingkat kemiskinan			c.	nilai investasi						
						2.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB						
						3.	Cakupan bina kelompok pengrajin						

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
Indikator Kinerja Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
TAHUN 2016 - 2021

V I S I : TERWUJUDNYA TENAGA KERJA, INDUSTRI, DAN TRANSMIGRAN YANG TERBINA, BERKUALITAS, PRODUKTIF, TERAMPIL, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA DALAM HUBUNGAN KERJA YANG HARMONIS, DINAMIS DAN BERKEADILAN

M I S I 1 : Mengembangkan Sistem Informasi dan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah

TUJUAN 1.1 : Pengembangan Sistem Informasi dan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah

No	Indikator Tujuan	Satuan	Target Indikator Kinerja					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase pertumbuhan	%	4.67	4.1	4.2	4.3	4.4	5
2	PDRB per Kapita (tahun dasar	Rp	28.620.000	28.848.960	31.156.877	33.649.427	36.341.381	39.248.691
3	Laju Inflasi	tahun	5.90	5.55	5.56	5.50	5.50	5.50
4	Tingkat Kemiskinan	%	9.5	9	8.7	8.5	8	8
5	Angka Pengangguran Terbuka	%	2.02	2	1.98	1.96	1.94	1.92

Sasaran				Satuan	Target Indikator Kinerja						Seks/Bidang/Bagian Pelaksana	
Uraian		Indikator Kinerja			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Meningkatnya kualitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja	1	Angka partisipasi angkatan kerja	%	57.07	55.06	59.03	65.03	73.05	80.05	1	Bidang Tenaga Kerja
		2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	55,07	57,06	59,03	65,03	73,05	75,05		
		3	Pencari kerja yang ditempatkan	%	55	75	100	100	100	100		
		4	Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	%	55	65	75	80	100	150		
		5	Jumlah pelatihan kerja	agktn	3	5	7	9	15	20		
		6	Jumlah sertifikasi pekerja	jenis	2	3	5	7	10	15		

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
Indikator Kinerja Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
TAHUN 2016 - 2021

V I S I : TERWUJUDNYA TENAGA KERJA, INDUSTRI, DAN TRANSMIGRAN YANG TERBINA, BERKUALITAS, PRODUKTIF, TERAMPIL, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA DALAM HUBUNGAN KERJA YANG HARMONIS, DINAMIS DAN BERKEADILAN

M I S I 3 : Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi

TUJUAN 3.2 : Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi

No	Indikator Tujuan	Satuan	Target Indikator Kinerja					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Transmigran	KK	75	50	50	50	75	50
2	Jumlah Transmigrasi Lokal	KK	75	50	50	50	75	50
3	MoU antar daerah pengirim dan penerima	Dok	3	3	3	3	3	3
4	Jumlah KK dan Jiwa warga transmigrasi	KK/Jiwa	100/400	100/400	200/800	100/400	150/600	100/400
5	Luasan area transmigrasi baru	Ha	250	250	500	250	350	250

Sasaran				Satuan	Target Indikator Kinerja						Sek/Bidang/Bagian Pelaksana	
Uraian		Indikator Kinerja			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
2	meningkatnya pembinaan, penyuluhan dan pengembangan kawasan transmigrasi	1.	Kerjasama antar daerah kawasan transmigrasi	%	(Jateng, Lampung, NTT)	(Jateng, Jabar&Jatim)	(Jateng, Jabar&Lampung)	(Jateng, Jabar&Jatim)	(Jateng, Jabar&Jatim)	(Jateng, Jabar&Jatim)	1	Bidang Transmigrasi
		2	Persentase Pembinaan warga transmigrasi	%	60	65	70	75	80	100		

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
Indikator Kinerja Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
TAHUN 2016 - 2021

V I S I : TERWUJUDNYA TENAGA KERJA, INDUSTRI, DAN TRANSMIGRAN YANG TERBINA, BERKUALITAS, PRODUKTIF, TERAMPIL, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA DALAM HUBUNGAN KERJA YANG HARMONIS, DINAMIS DAN BERKEADILAN

M I S I 2 : Mengembangkan Investasi Industri, Niaga dan Kemantapan Kelembagaan dan Kesejahteraan UMKM

TUJUAN 2.1 : Pengembangan Investasi Industri, Niaga dan Kemantapan Kelembagaan dan Kesejahteraan UMKM

No	Indikator Tujuan	Satuan	Target Indikator Kinerja					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase pertumbuhan ekonomi	%	4.67	4.1	4.2	4.3	4.4	5
2	PDRB per Kapita (tahun dasar 2010)	Rp	28.620.000	28.848.960	31.156.877	33.649.427	36.341.381	39.248.691
3	Laju Inflasi	tahun	5.90	5.55	5.56	5.50	5.50	5.50
4	Tingkat Kemiskinan	%	2,02	9	8.7	8.5	8	8
5	Angka Pengangguran	%	2.02	2.01	2.01	2.0	1.95	1.92

Sasaran			Satuan	Target Indikator Kinerja						Sek/Bidang/Bagian Pelaksana	
Uraian		Indikator Kinerja		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
2	Meningkatnya Produksi Sektor Industri	1. Perkembangan IKM:								1	Bidang Perindustrian
		a. Jumlah Unit	Unit	812	1086	1096	1110	1120	1130		
		b. Tenaga Kerja	org	1818	2746	2846	2986	3086	3186		
		c. Nilai Investasi	Rp	40.600.000.000	54.300.000.000	54.800.000.000	55.500.000.000	56.000.000.000	56.500.000.000		
		2. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	11.07	11.07	11.07	11.07	11.07	11.07		
		5. Cakupan bina kelompok pengrajin	%	2.22	2.30	2.74	3.15	3.57	4.42		

BAB. V

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

Matriks Pagu Indikatif Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi

Tahun 2016 - 2021

- VISI : TERWUJUDNYA TENAGA KERJA, INDUSTRI, DAN TRANSMIGRAN YANG TERBINA, BERKUALITAS, PRODUKTIF, TERAMPIL, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA DALAM HUBUNGAN KERJA YANG HARMONIS, DINAMIS DAN BERKEADILAN
- MISI 1 : Mengembangkan Sistem Informasi dan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah
- TUJUAN 1.1 : Pengembangan Sistem Informasi dan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah

Sasaran		Program	PAGU INDIKATIF (Rp)						Ses/Bidang/Bagian Pelaksana
Uraian	Indikator Kinerja		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Meningkatnya kualitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja	1 Angka partisipasi angkatan kerja	1 Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Kerja (PKPTK)	210.070.300	231.077.330	254.185.063	279.603.569	307.563.926	338.320.319	1 Bidang Tenaga Kerja
	2 Tingkat partisipasi angkatan kerja	2 Peningkatan Kesempatan Kerja	216.061.650	237.667.815	261.343.597	287.578.056	316.335.862	347.969.448	
	3 Pencari kerja yang ditempatkan	3 Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	670.029.900	737.032.890	810.736.179	891.809.797	980.990.777	1.079.089.854	
	4 Keselamatan dan perlindungan tenaga								
	5 Jumlah pelatihan kerja								
	6 Jumlah sertifikasi pekerja								

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
Matriks Pagu Indikatif Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
Tahun 2016 - 2021

MISI 3 : Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi
TUJUAN 3.1 : Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi

[illegible]

BAB. V
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
Matriks Pagu Indikatif Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
Tahun 2016 - 2021

- VISI

: TERWUJUDNYA TENAGA KERJA, INDUSTRI, DAN TRANSMIGRAN YANG TERBINA, BERKUALITAS, PRODUKTIF, TERAMPIL, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA DALAM HUBUNGAN KERJA YANG HARMONIS, DINAMIS DAN BERKEADILAN
- MISI 2

: Mengembangkan Investasi Industri, Niaga dan Kemantapan Kelembagaan dan Kesejahteraan UMKM
- TUJUAN 2.1

: Pengembangan Investasi Industri, Niaga dan Kemantapan Kelembagaan dan Kesejahteraan UMKM

Sasaran				Program		PAGU INDIKATIF (Rp)						Sek/Bidang/Bagian Pelaksana	
Uraian		Indikator Kinerja				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
2	Meningkatnya produksi sektor industri	1.	Perkembangan IKM:	1	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	208.004.000	435.000.000	490.000.000	525.000.000	565.000.000	595.000.000	1	Bidang Perindustrian
		a.	Jumlah Unit	2	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1.513.413.000	7.900.850.000	7.265.850.000	6.927.850.000	6.690.850.000	6.840.850.000		
		b.	Tenaga Kerja										
		c.	Nilai Investasi										
		2.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB										
		3.	Cakupan bina kelompok pengrajin										

MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021

DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS HULU

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indiaktor Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
						2016		2017		2018		2019		2020		2021							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Peningkatan pengelolaan teknis pelayanan administrasi perkantoran.	Tersedianya layanan teknis administrasi perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran																	Bagian Sekretariat	Dinas Nakertransos		
			Penyediaan jasa surat menyurat	terpenuhinya kegiatan surat menyurat	90%	12 bln	13.500.000	12 bln	14.850.000	12 bln	16.335.000	12 bln	17.968.500	12 bln	19.765.350	12 bln	21.741.885	90%	104.160.735				
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	lancarnya kegiatan kantor Dinas Nakertransos	90%	12 bln	54.600.000	12 bln	60.060.000	12 bln	66.066.000	12 bln	72.672.600	12 bln	79.939.860	12 bln	87.933.846	90%	421.272.306				
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	tersedianya dana pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100%	41 unit	16.450.000	41 unit	18.095.000	41 unit	19.904.500	41 unit	21.894.950	41 unit	24.084.445	41 unit	26.492.890	100%	126.921.785				
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	tersedianya kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan	100%	12 bln	80.880.000	12 bln	88.968.000	12 bln	97.864.800	12 bln	107.651.280	12 bln	118.416.408	12 bln	130.258.049	100%	624.038.537				
			Penyediaan jasa pengamanan dan kebersihan kantor	terpenuhinya penyediaan jasa kebersihan kantor	100%	12 bln	21.400.000	12 bln	23.540.000	12 bln	25.894.000	12 bln	28.483.400	12 bln	31.331.740	12 bln	34.464.914	100%	165.114.054				
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	persentase ketercapaian penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	90%	12 bln	33.400.000	12 bln	36.740.000	12 bln	40.414.000	12 bln	44.455.400	12 bln	48.900.940	12 bln	53.791.034	90%	257.701.374				
			Penyediaan alat tulis kantor	meningkatnya kinerja dinas	90%	12 bln	59.000.000	12 bln	64.900.000	12 bln	71.390.000	12 bln	78.529.000	12 bln	86.381.900	12 bln	95.020.090	90%	455.220.990				
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	kinerja pegawai meningkat	100%	12 bln	55.050.000	12 bln	60.555.000	12 bln	66.610.500	12 bln	73.271.550	12 bln	80.598.705	12 bln	88.658.576	100%	424.744.331				
			Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase ketersediaanya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	12 bln	172.150.000	12 bln	189.365.000	12 bln	208.301.500	12 bln	229.131.650	12 bln	252.044.815	12 bln	277.249.297	100%	1.328.242.262				
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya sarana dan prasarana kantor	100%	1 pkt	247.860.000	3 unit	272.646.000	3 unit	299.910.600	3 unit	329.901.660	3 unit	362.891.826	3 unit	399.181.009	100%	1.912.391.095				
			Penyediaan peralatan rumah tangga	terpenuhinya peralatan rumah tangga	100%	4 tbg	800.000	4 tbg	880.000	4 tbg	968.000	4 tbg	1.064.800	4 tbg	1.171.280	4 tbg	1.288.408	100%	6.172.488				
			Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	persentase penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	108 eks	16.200.000	108 eks	17.820.000	108 eks	19.602.000	108 eks	21.562.200	108 eks	23.718.420	108 eks	26.090.262	100%	124.992.882				
			Penyediaan makanan dan minuman	adanya konsumsi untuk pegawai	100%	12 bln	216.700.000	1 TA	238.370.000	1 TA	262.207.000	1 TA	288.427.700	1 TA	317.270.470	1 TA	348.997.517	100%	1.671.972.687				
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	perencanaan dan pelaksanaan kegiatan berjalan baik	100%	12 bln	741.856.000	12 bln	816.041.600	12 bln	897.645.760	12 bln	897.645.760	12 bln	897.645.760	12 bln	897.645.760	100%	5.148.480.640				
			Rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah	perencanaan dan pelaksanaan kegiatan berjalan baik	100%	12 bln	233.063.000	12 bln	256.369.300	12 bln	282.006.230	12 bln	208.006.230	12 bln	208.006.230	12 bln	208.006.230	100%	1.395.457.220				
			Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa	pelelangan berjalan baik	100%	12 bln	9.000.000	12 bln	9.900.000	12 bln	10.890.000	12 bln	11.979.000	12 bln	13.176.900	12 bln	14.494.590	100%	69.440.490				
			Pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan SKPD	pengendalian personil	100%	12 bln	13.058.000	12 bln	14.363.800	12 bln	15.800.180	12 bln	17.380.198	12 bln	19.118.218	12 bln	21.030.040	100%	100.750.435				
			Penyusunan RKA dan DPA SKPD	dokumen RKA dan DPA	100%	12 bln	14.308.000	12 bln	15.738.800	12 bln	17.312.680	12 bln	19.043.948	12 bln	20.948.343	12 bln	23.043.177	100%	110.394.948				
			Penyediaan jasa pendukung kantor	terpenuhinya penyediaan jasa pendukung kantor	100%	12 bln	173.582.000	12 bln	190.940.200	12 bln	210.034.220	12 bln	231.037.642	12 bln	254.141.406	12 bln	279.555.547	100%	1.339.291.015				
			Penyediaan jasa publikasi	terpenuhinya penyediaan jasa publikasi	100%	12 bln	26.100.000	12 bln	28.710.000	12 bln	31.581.000	12 bln	34.739.100	12 bln	38.213.010	12 bln	42.034.311	100%	201.377.421				
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																				
			Penyediaan sarana pendukung gedung kantor	produktivitas pegawai meningkat	100%	1 pkt	199.000.000	1 pkt	218.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	produktivitas pegawai meningkat	100%	12 bln	31.431.000	12 bln	34.574.100	12 bln	38.031.510	12 bln	41.834.661	12 bln	46.018.127	12 bln	50.619.940	100%	242.509.338				
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	kendaraan dinas/operasional terpelihara	100%	3 unit roda 4	142.100.000	3 unit roda 4	156.310.000	3 unit roda 4	171.941.000	3 unit roda 4	189.135.100	3 unit roda 4	208.048.610	3 unit roda 4	228.853.471	100%	1.096.388.181				
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100%	12 bln	2.500.000	12 bln	2.750.000	12 bln	3.025.000	12 bln	3.327.500	12 bln	3.660.250	12 bln	4.026.275	100%	19.289.025				
			Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	produktivitas pegawai meningkat	100%	1 pkt	220.000.000	1 pkt	-	-	350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-			-	

			Program Peningkatan Disiplin Aparatur																		
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	pakaian dinas pegawai	100%	94 stel	56.400.000	94 stel	62.040.000	84 stel	35.000.000	-	-	84 stel	35.000.000	-	-	84 stel	35.000.000		
			Pengadaan pakaian olahraga pegawai	pakaian olahraga pegawai	100%	-	-	-	-	84 stel	35.000.000	-	-			-	-	-	-		
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																		
			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	keterampilan pegawai meningkat	100%	12 bln	187.000.000	12 bln	205.700.000	12 bln	226.270.000	12 bln	248.897.000	12 bln	273.786.700	12 bln	301.165.370	100%	1.442.819.070		
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																		
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD/LAKIP	kinerja dapat diukur	100%	12 bln	14.048.000	12 bln	15.452.800	12 bln	16.998.080	12 bln	18.697.888	12 bln	20.567.677	12 bln	22.624.444	100%	108.388.889		
			Penyusunan laporan keuangan semesteran	pengendalian keuangan tercapai	100%	12 bln	13.558.000	12 bln	14.913.800	12 bln	16.405.180	12 bln	18.045.698	12 bln	19.850.268	12 bln	21.835.295	100%	104.608.240		
			Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	pengendalian keuangan tercapai	100%	12 bln	12.808.000	12 bln	14.088.800	12 bln	15.497.680	12 bln	17.047.448	12 bln	18.752.193	12 bln	20.627.412	100%	98.821.533		
			Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	tersusunnya dokumen LPPD	100%	12 bln	-	-	-	12 bln	10.000.000	12 bln	10.000.000	12 bln	10.000.000	12 bln	10.000.000	12 bln	10.000.000		
Penyusunan rencana kerja SKPD	pengendalian keuangan tercapai	100%	12 bln	11.648.000	12 bln	12.812.800	12 bln	14.094.080	12 bln	15.503.488	12 bln	17.053.837	12 bln	18.759.220	100%	89.871.425					
Pengembangan Sistem Informasi dan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	Meningkatnya kualitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja	1. Angka partisipasi angkatan kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Kerja (PKPTK)																		
		2. Tingkat partisipasi angkatan kerja	Pendidikan dan pelatihan tenaga kerja produktif	Pelatihan Menjahit	100%	16 org	210.070.300	16 org	231.077.330	20 org	320.451.000	25 org	352.496.100	30 org	387.745.710	35 org	426.520.281	142 org	1.928.360.721	Bidang Tenaga kerja	Putussibau
		3. Pencari kerja yang ditempatkan	Pelayanan perluasan kesempatan kerja (padat karya)	Pembersihan parit			-	16 org	200.000.000	23 org	368.243.000	30 org	405.067.300	35 org	445.574.030	40 org	490.131.433	144 org	1.909.015.763		Putussibau
		4. Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	Pelayanan perluasan kesempatan kerja (pembinaan dan penempatan tenaga kerja	Kartu Angkatan Kerja (AK-1 Ketenagakerjaan)		-	-	-	12 bln	45.232.000	12 bln	45.232.000	12 bln	45.323.000	12 bln	45.323.000	5 TA	181.110.000	Putussibau		
		5. Jumlah pelatihan kerja	Pelatihan tenaga kerja produktif daerah perbatasan	tenaga kerja terampil		-	-	-	40 org	300.000.000	40 org	300.000.000	40 org	300.000.000	40 org	300.000.000	160 org	1.200.000.000	5 Kec. Wilayah Perbatasan		
		6. Jumlah sertifikasi pekerja																			
			Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan																		
		-	Pembinaan dan perlindungan serta penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	Hubungan industrial yang baik	70%	509 prshn	66.076.500	509 prshn	72.684.150	509 prshn	79.952.565	509 prshn	87.947.822	509 prshn	96.742.604	509 prshn	106.416.864	5 TA	509.820.504	Bidang Tenaga kerja	23 Kecamatan wilayah Kab. Kapuas Hulu
			Penyusunan upah minimum kabupaten (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten (UMSK) Kab. Kapuas Hulu	adanya UMK dan UMSK Kab. Kapuas Hulu	100%	1 kgt	127.000.000	1 kgt	139.700.000	1 kgt	331.200.000	1 kgt	364.320.000	1 kgt	400.752.000	1 kgt	440.827.200	1 kgt	1.803.799.200		Putussibau
			Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	diterapkannya peraturan-peraturan ketenagakerjaan di perusahaan.	80%	12 bln	94.591.200	12 bln	104.050.320	12 bln	114.455.352	12 bln	125.900.887	12 bln	138.490.976	12 bln	152.340.074	12 bln	729.828.809		23 Kecamatan wilayah Kab. Kapuas Hulu
	Rapat-rapat koordinasi pegawai pengawas dan perantara tenaga kerja tingkat provinsi dan pusat	terkoordinasinya rapat pegawai pengawas dan perantara tenaga kerja tingkat provinsi dan pusat.	80%	12 bln	320.645.800	12 bln	352.710.380	12 bln	387.981.418	12 bln	426.779.560	12 bln	469.457.516	12 bln	516.403.267	5 TA	2.473.977.941	Provinsi dan Pusat			
Pengembangan investasi industri, niaga dan kemantapan kelembagaan dan kesejahteraan UMKM	Meningkatnya produksi sektor industri	1. Perkembangan IKM:	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri																		
		a. Jumlah unit	Penyediaan peralatan pengolahan limbah kayu belian	terpenuhinya peralatan bagi IKM pengolahan limbah kayu belian.		1 kgt	15.850.000	1 kgt	20.000.000	1 kgt	20.000.000	1 kgt	20.000.000	1 kgt	30.000.000	1 kgt	40.000.000	5 TA	145.850.000	Bidang Perindustrian	Prov & Pusat
		b. Tenaga kerja	Penyediaan peralatan dan perlengkapan pengolahan abon ikan	terpenuhinya peralatan bagi IKM pengolahan abon ikan		1 kgt	12.951.000	1 kgt	25.000.000	1 kgt	30.000.000	1 kgt	35.000.000	1 kgt	40.000.000	1 kgt	45.000.000	5 TA	187.951.000		Kab. Kapuas Hulu
		c. nilai investasi	Penyediaan peralatan dan perlengkapan pengolahan ikan	terpenuhinya peralatan bagi IKM pengolahan ikan berbasis air tawar		1 kgt	40.850.000	1 kgt	70.000.000	1 kgt	80.000.000	1 kgt	90.000.000	1 kgt	95.000.000	1 kgt	100.000.000	5 TA	475.850.000		
		2. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Penyediaan peralatan dan perlengkapan diversifikasi produk anyaman	terpenuhinya peralatan dan perlengkapan pengembangan produk bagi IKM anyaman.		1 kgt	35.850.000	1 kgt	40.000.000	1 kgt	45.000.000	1 kgt	50.000.000	1 kgt	55.000.000	1 kgt	60.000.000	5 TA	285.850.000		

3. Cakupan bina kelompok pengrajin	Penyediaan mesin, peralatan dan perlengkapan IKM pengolahan madu	terpenuhinya peralatan pengolahan madu		1 kgt	102.503.000	1 kgt	150.000.000	1 kgt	160.000.000	1 kgt	170.000.000	1 kgt	180.000.000	1 kgt	180.000.000	5 TA	942.503.000
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan bagi IKM pandai besi	terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kerja bagi IKM pandai besi		-	-	1 kgt	80.000.000	1 kgt	80.000.000	1 kgt	80.000.000	1 kgt	80.000.000	1 kgt	80.000.000	4 TA	400.000.000
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan bagi IKM meubel kayu	tersedianya peralatan dan perlengkapan bagi pelaku IKM		-	-	1 kgt	70.000.000	1 kgt	75.000.000	1 kgt	80.000.000	1 kgt	85.000.000	1 kgt	90.000.000	4 TA	400.000.000
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah																
	Operasional Balai Sentra Kerajinan Industri	terpenuhi dan terpeliharanya sarana dan prasarana di Balai Sentra Kerajinan Industri		1 kgt	6.280.000	1 kgt	25.000.000	1 kgt	25.000.000	1 kgt	25.000.000	1 kgt	25.000.000	1 kgt	25.000.000	5 TA	131.280.000
	Pembuatan pagar Balai Sentra Kerajinan Industri	meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan		-	-	1 kgt	600.000.000	1 kgt	150.000.000	-	-	-	-	-	-	2 TA	750.000.000
	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang Balai Sentra Kerajinan Industri	meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan		-	-	1 kgt	250.000.000	1 kgt	250.000.000	1 kgt	250.000.000	-	-	-	-	3 TA	750.000.000
	Pembinaan, monitoring dan evaluasi pada pelaku IKM	meningkatkan kemampuan produksi para pelaku IKM		1 kgt	276.567.000	1 kgt	280.000.000	1 kgt	285.000.000	1 kgt	287.000.000	1 kgt	290.000.000	1 kgt	290.000.000	5 TA	1.708.567.000
	Sosialisasi dan fasilitasi HKI, SNI dan MUI	meningkatkan kesadaran pelaku IKM dalam menerapkan standar, keamanan dan halal produk.		1 kgt	1.650.000	1 kgt	120.000.000	1 kgt	130.000.000	1 kgt	140.000.000	1 kgt	150.000.000	1 kgt	160.000.000	5 TA	701.650.000
	Fasilitasi pengembangan IKM tenun	meningkatkan kualitas dan kuantitas produk		1 kgt	4.950.000	1 kgt	20.000.000	1 kgt	20.000.000	1 kgt	20.000.000	1 kgt	20.000.000	1 kgt	20.000.000	5 TA	104.950.000
	Penyediaan bahan baku dan perlengkapan tenun	terpenuhinya bahan baku benang bagi IKM tenun		1 kgt	90.850.000	1 kgt	100.000.000	1 kgt	120.000.000	1 kgt	130.000.000	1 kgt	140.000.000	1 kgt	150.000.000	5 TA	730.850.000
	Penyediaan bahan baku, peralatan dan perlengkapan bagi IKM pengolahan rotan	tersedianya bahan baku bagi pelaku IKM		1 kgt	10.000.000	1 kgt	20.000.000	1 kgt	30.000.000	1 kgt	40.000.000	1 kgt	45.000.000	1 kgt	50.000.000	5 TA	195.000.000
	Penyediaan bahan baku dan perlengkapan bagi IKM pengolahan manik-manik	tersedianya bahan baku bagi pelaku IKM		1 kgt	70.850.000	1 kgt	70.850.000	1 kgt	70.850.000	1 kgt	70.850.000	1 kgt	70.850.000	1 kgt	70.850.000	5 TA	425.100.000
	Fasilitasi pengujian produk pangan	terciptanya produk yang aman dan memenuhi SNI		1 kgt	15.458.000	1 kgt	30.000.000	1 kgt	30.000.000	1 kgt	30.000.000	1 kgt	35.000.000	1 kgt	35.000.000	5 TA	175.458.000
	Fasilitasi bahan promosi pada Balai Sentra Kerajinan Industri	tersedianya aneka produk unggulan khas Kapuas Hulu di Balai Sentra Kerajinan Industri		1 kgt	20.000.000	1 kgt	30.000.000	1 kgt	35.000.000	1 kgt	40.000.000	1 kgt	45.000.000	1 kgt	45.000.000	5 TA	215.000.000
	Penyusunan rencana induk pembangunan industri daerah (RIPIDA) Kab. Kapuas Hulu	tersusunnya dokumen RIPIDA Kab. Kapuas Hulu		1 kgt	250.000.000	1 kgt	150.000.000	1 kgt	150.000.000	-	-	-	-	-	-	3 TA	550.000.000
	Penyediaan bahan baku dan perlengkapan kerajinan tangan	tersedianya bahan baku dan perlengkapan untuk IKM kerajinan tangan		1 kgt	75.000.000	1 kgt	80.000.000	1 kgt	85.000.000	1 kgt	85.000.000	1 kgt	90.000.000	1 kgt	95.000.000	5 TA	510.000.000
	Partisipasi dalam rangka kegiatan lomba desa	meningkatkan daya saing produk dan terciptanya pelaku IKM baru		1 kgt	39.452.000	1 kgt	60.000.000	1 kgt	60.000.000	1 kgt	60.000.000	1 kgt	60.000.000	1 kgt	60.000.000	5 TA	339.452.000
	Partisipasi pada kegiatan pameran dalam dan luar provinsi	meningkatkan daya saing produk unggulan khas daerah Kapuas Hulu baik di pasar lokal, nasional dan internasional.		1 kgt	400.000.000	1 kgt	400.000.000	1 kgt	400.000.000	1 kgt	400.000.000	1 kgt	400.000.000	1 kgt	400.000.000	5 TA	2.400.000.000
	Promosi pameran produk unggulan daerah khas Kapuas Hulu (dalam daerah Kab. Kapuas Hulu)	meningkatkan daya saing produk unggulan dari kecamatan		-	-	1 kgt	250.000.000	1 kgt	250.000.000	1 kgt	250.000.000	1 kgt	250.000.000	1 kgt	250.000.000	4 TA	1.250.000.000
	Partisipasi pada kegiatan P2W-KSS	meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga		1 kgt	70.000.000	1 kgt	75.000.000	1 kgt	80.000.000	1 kgt	80.000.000	1 kgt	80.000.000	1 kgt	80.000.000	5 TA	465.000.000
	Bimtek pengembangan produk berbasis ikan air tawar	terciptanya produk makanan olahan ikan modern berbasis ikan air tawar		-	-	1 kgt	130.000.000	1 kgt	140.000.000	1 kgt	150.000.000	1 kgt	160.000.000	1 kgt	170.000.000	4 TA	750.000.000
	Bimtek pengembangan produk berbasis bahan baku rotan dan bambu	terciptanya aneka produk kerajinan berbasis bahan baku rotan dan bambu		-	-	1 kgt	120.000.000	1 kgt	130.000.000	1 kgt	140.000.000	1 kgt	150.000.000	1 kgt	160.000.000	4 TA	700.000.000
	Bimtek pengembangan produk berbasis bahan baku serat alam	terciptanya aneka produk kerajinan berbasis bahan baku serat alam		-	-	1 kgt	120.000.000	1 kgt	130.000.000	1 kgt	140.000.000	1 kgt	150.000.000	1 kgt	160.000.000	4 TA	700.000.000
	Konvensi gugus kendali mutu (GKM)	terciptanya standarisasi kerja dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produk		-	-	1 kgt	250.000.000	-	-	1 kgt	75.000.000	-	-	1 kgt	75.000.000	3 TA	400.000.000
	Bimtek pengembangan dan pencelupan produk IKM tenun	meningkatkan daya saing produk di pasar		-	-	1 kgt	150.000.000	1 kgt	170.000.000	1 kgt	185.000.000	1 kgt	190.000.000	1 kgt	200.000.000	4 TA	895.000.000

Prov & Pusat

Kab. Kapuas Hulu

			Kaji terap produk bagi pelaku IKM	meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pengrajin		-	-	1 kgt	80.000.000	1 kgt	80.000.000	1 kgt	80.000.000	1 kgt	80.000.000	1 kgt	80.000.000	4 TA	400.000.000		
			Pembangunan sentra IKM	terbangunnya sarana dan prasarana bagi pelaku IKM		-	-	2 sentra	600.000.000	2 sentra	600.000.000	2 sentra	600.000.000	2 sentra	600.000.000	2 sentra	600.000.000	4 TA	3.000.000.000		
			Revitalisasi sentra di Kab. Kapuas Hulu	tersedianya sarana penunjang sentra		-	-	2 sentra	1.000.000.000	2 sentra	1.000.000.000	2 sentra	1.000.000.000	2 sentra	1.000.000.000	2 sentra	1.000.000.000	4 TA	5.000.000.000		
			Rehab sentra pengolahan madu	tersedianya sarana produksi		-	-	1 sentra	2.000.000.000	1 sentra	2.000.000.000	1 sentra	2.000.000.000	1 sentra	2.000.000.000	1 sentra	2.000.000.000	4 TA	10.000.000.000		
			Kajian pembangunan kawasan industri Kapuas Hulu	terbangunnya kawasan industri Kapuas Hulu		-	-	1 kgt	250.000.000	1 kgt	200.000.000	-	-	-	-	-	-	2 TA	450.000.000		
			Lomba fashion tenun	meningkatkan kecintaan pada produk unggulan daerah		-	-	1 kgt	150.000.000	1 kgt	150.000.000	1 kgt	150.000.000	1 kgt	150.000.000	1 kgt	150.000.000	4 TA	750.000.000		
			Pendataan IKM di Kab. Kapuas Hulu	tersedianya informasi database yang akurat		-	-	23 Kec	150.000.000	23 Kec	150.000.000	23 Kec	150.000.000	23 Kec	150.000.000	23 Kec	150.000.000	4 TA	750.000.000		
			Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran																		
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terciptanya sinkronisasi program/kegiatan bidang perindustrian		1 kgt	182.356.000	1 kgt	190.000.000	1 kgt	195.000.000	1 kgt	200.000.000	1 kgt	210.000.000	1 kgt	215.000.000	5 TA	1.192.356.000		
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																		
			Diklat Aparatur Pembina Bidang Perindustrian	meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai		-	-	1 kgt	150.000.000	1 kgt	150.000.000	1 kgt	150.000.000	1 kgt	150.000.000	1 kgt	150.000.000	4 TA	750.000.000		
Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi	Tersedianya calon transmigran yang siap diberangkatkan ke tempat tujuan	1. Persentase kerjasama antar daerah kawasan transmigrasi	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi																	Bidang Transmigrasi	wilayah Transmigrasi Kab. Kapuas Hulu
		2. Transmigrasi Swakarsa	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	MoU kerjasama antar daerah	100%	100%	210.351.000	-	-	-	100%	225.000.000	-	-	100%	225.000.000	100%	660.351.000			
		3. Sosialisasi program pengembangan permukiman transmigrasi baru (PTB)	Pembinaan usaha ekonomi daerah permukiman transmigrasi	bantuan modal usaha	100%	100%	78.202.000	100%	165.868.000	100%	182.454.000	100%	200.699.400	100%	260.909.220	100%	339.181.986	100%	1.227.314.606		
			Perencanaan pembangunan di wilayah permukiman transmigrasi	perencanaan fasilitas lokasi transmigrasi	100%	100%	61.000.000	100%	108.700.000	100%	119.570.000	100%	131.527.000	100%	170.985.100	100%	222.280.630	100%	814.062.730		
			Redesain pembangunan di wilayah permukiman transmigrasi	rencana pembangunan	100%	100%	35.000.000	100%	-	100%	-	100%	37.000.000	100%	-	100%	40.000.000	100%	112.000.000		
			Penyelenggaraan rapat kerja dan konsultasi/koordinasi program pengembangan permukiman transmigrasi	rapat koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan (provinsi/ pusat)	100%	100%	219.200.000	100%	270.440.000	100%	297.484.000	100%	327.232.400	100%	425.402.120	100%	553.022.756	100%	2.092.781.276		
			Rencana tata ruang kawasan calon transmigrasi/ RT-UPT	Sosialisasi program transmigrasi baru (PTB) wilayah perbatasan	100%	100%	90.292.000	100%	78.818.000	100%	86.669.800	100%	95.336.780	100%	104.870.458	100%	115.357.504	100%	571.344.542		
			Pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi penduduk setempat	terdapatnya calon transmigrasi	100%	100%	46.868.000	-	-	100%	48.000.000	100%	-	100%	50.000.000	100%	144.868.000				
			Pembuatan sertifikat lahan transmigrasi	persentase sertifikat tanah warga transmigrasi	-	-	-	-	5 UPT	1.000.000.000	-	-	-	-	-	5 UPT	1.000.000.000				
			Program Transmigrasi Penduduk Lokal/Setempat																		
			Pembinaan, penyuluhan terpadu pengembangan kawasan program transmigrasi permukiman transmigrasi UPT binaan	penyuluhan program transmigrasi	100%	100%	262.644.000	100%	176.678.000	100%	194.345.800	100%	213.780.380	100%	235.158.418	100%	258.674.260	100%	1.341.280.858		
			Penggerakan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi	terfasilitasinya	100%	100%	45.481.000	100%	-	100%	-	100%	47.000.000	100%	-	100%	48.000.000	100%	140.481.000		
		Pelatihan transmigrasi lokal/kegiatan Gema Inposma	meningkatnya kesejahteraan warga transmigrasi	100%	100%	92.039.000	100%	118.996.000	100%	130.895.600	100%	143.985.160	100%	158.383.676	100%	174.222.044	100%	818.521.480			

Putussibau, Agustus 2017
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
Kabupaten Kapuas Hulu,

Drs. Abdullah Usman, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 195803231980031012